



# E-PAPER PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://epaper.dpr.go.id>

---

**Judul** : PROGRAM PADAT KARYA TUNAI, PUPR Bidik Warga Desa & TKI  
**Tanggal** : Selasa, 14 April 2020  
**Surat Kabar** : Bisnis Indonesia  
**Halaman** : 7

Bisnis, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempercepat realisasi program padat karya tunai Rp10,22 triliun untuk menyerap tenaga kerja dan distribusi dana pembangunan di daerah. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan padat karya tunai ditujukan mempertahankan daya beli masyarakat di tengah pandemi virus corona. “Program padat karya tunai di Kementerian PUPR ini ada Rp10 triliun. Jadi, mendistribusikan uang pembangunan ke desa-desa masih bisa dilaksanakan karena kita masih memanfaatkan atau menggunakan protokol kesehatan,” ujarnya dalam konferensi pers di Graha BNPB yang disiarkan secara daring, Senin (13/4). Basuki menambahkan protokol kesehatan mengatur jumlah pekerja minimal di lapangan. Dia mencontohkan untuk program perbaikan irigasi kecil yang biasanya dilakukan sekitar 70-80 orang akan dibagi dua menjadi 40 orang yang nantinya akan dibuat penjadwalan kerja per pekan. Penyelesaian diperkirakan lebih lama, yaitu sekitar 3 bulan dari biasanya 2 bulan. Adapun mekanisme program padat karya tunai, lanjutnya, diawali dengan merekrut tenaga pendamping. Proses selanjutnya, sosialisasi dan pelaksanaan di lapangan. Upah pekerja akan dibayar secara mingguan. “Sekarang ini sudah mulai. Minggu pertama April sudah mulai di beberapa lokasi,” ujarnya. Basuki menambahkan program padat karya tunai ini juga bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri karena akan dilaksanakan di daerah tujuan tenaga kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia. “[Jadi tenaga kerja] yang pulang dari Malaysia, kami identifikasi dari mana asalnya, kami siapkan program padat karya, sehingga nanti mereka di desa setelah isolasi mandiri bisa bekerja di padat karya yang sudah kami siapkan,” jelasnya. Sebagai informasi, padat karya tunai terdiri atas beberapa program, yaitu Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) di 10.000 lokasi dengan dana Rp2,25 triliun. Selain itu, pemeliharaan rutin jalan 47.017 km Rp0,51 triliun dan pemeliharaan rutin jembatan 496 km Rp0,11 triliun. Kemudian, program peningkatan kualitas rumah swadaya 208.000 unit Rp4,35 triliun. Program pembangunan baru rumah swadaya 12.000 unit Rp0,46 triliun. Selanjutnya, program penataan Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di 364 kelurahan Rp0,38 triliun. Pembuatan akuifer buatan simpanan air hujan (ABSAH) di 94 lokasi Rp0,03 triliun. Program lain, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di 4.771 desa dengan anggaran Rp1,12 triliun dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) di 1.028 lokasi dengan anggaran Rp0,39 triliun. Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di 900 kecamatan Rp0,54 triliun dan program Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di 106 lokasi senilai Rp0,06 triliun. Basuki menambahkan pihaknya juga akan membeli karet petani sebagai bahan campuran aspal. “Kami siapkan Rp100 miliar yang langsung kami beli ke koperasi di kawasan penghasil karet, seperti Pontianak, Kalimantan Barat, Sumsel, Lampung, Jambi. Kemudian, kami juga akan beli rosin, campuran untuk cat dalam membuat marka jalan,” jelasnya. (Agne Yasa)